

# Assurance Framework for Covid-19 and National Economic Recovery Expenditures – Entity Level

IIA Indonesia National Conference 2020

2 Desember 2020



A leading catalyst in the acceleration on the national infrastructure development

## **Setyo Wibowo, Ak., MM, CIA, CRMA, CISA, CA, QIA, GRCA**

Memperoleh gelar Akuntan setelah menyelesaikan pendidikan Diploma III (1987-1990) dan Diploma IV (1993-1996) pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, di Jakarta. Sementara itu Magister Manajemen diperolehnya dari Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor pada tahun 2006. Saat ini juga telah melewati ujian kandidasi Program Doktoral pada Program Manajemen Bisnis di perguruan tinggi yang sama (SB-IPB).

Sejak 1990, Setyo menjadi aparat pengawasan fungsional pemerintah pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga tahun 1998. Setelah 6 tahun penuh bekerja sebagai auditor internal pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sejak 2004 Setyo meneruskan karyanya pada beberapa jabatan di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan perusahaan afiliasinya hingga paruh pertama tahun 2017. Saat ini Setyo adalah Kepala Divisi Audit Internal (*Chief Audit Executive*) pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Sebagai aktivis pengembangan profesi audit internal di Indonesia, Setyo aktif menjadi relawan pada *The Institute of Internal Auditors (IIA)* Indonesia dan beberapa organisasi profesi audit internal lainnya. Dalam waktu luangnya, Setyo menyempatkan diri untuk menjadi *trainer* dan melakukan penelitian terkait profesi audit internal.



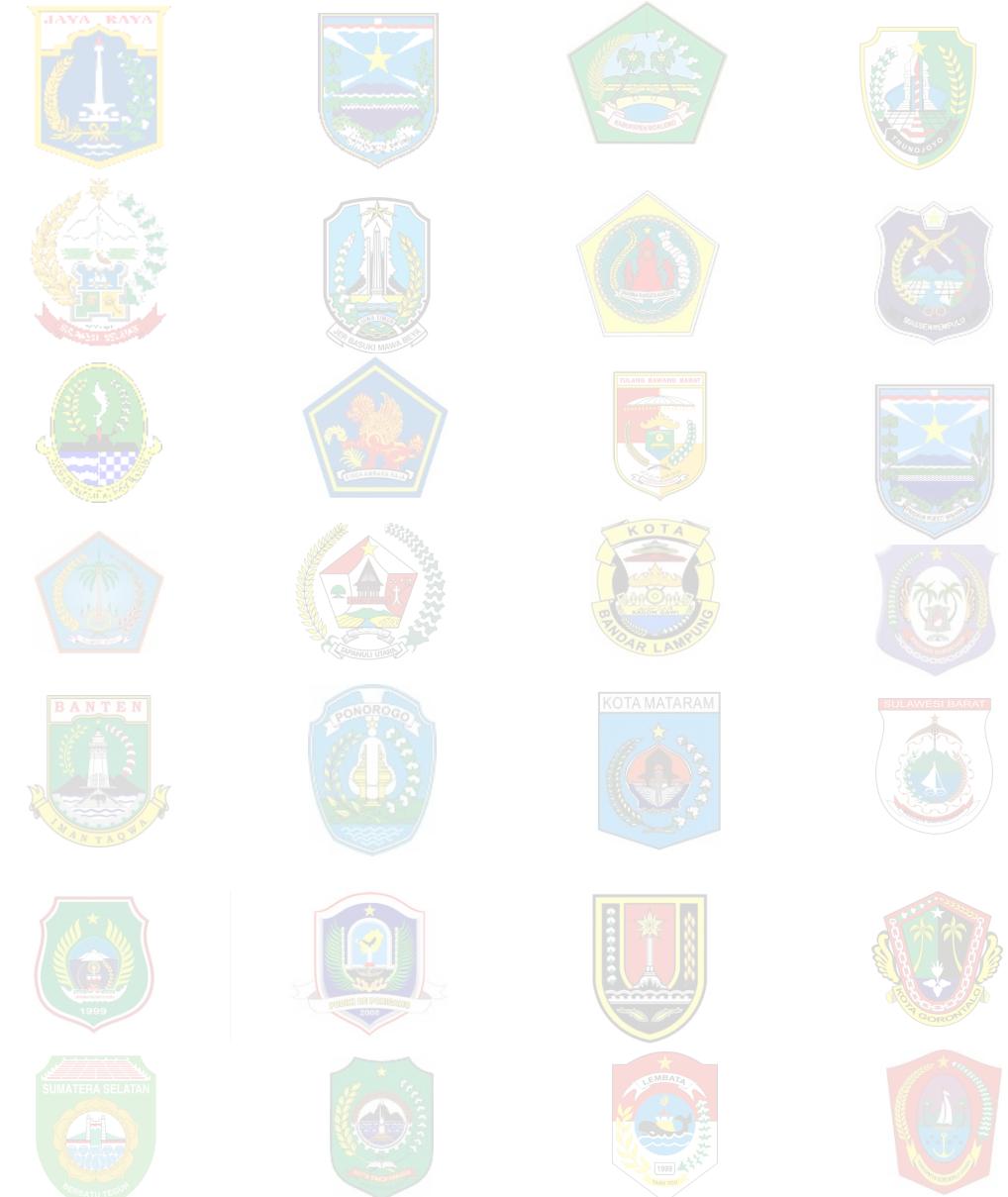
# AGENDA

- 01. Peran PT SMI dalam PEN Daerah**
- 02. Peran PT SMI dalam IP PEN**
- 03. Assurance Framework PEN – Level Entitas PT SMI**





## PEN - Pemda



# Program PEN untuk Pemerintah Daerah



## Alokasi Dana TA 2020

- Dari total pagu anggaran PEN (Rp 695,2T), dialokasikan untuk dukungan kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp 27T
- Dari total alokasi untuk Pemerintah Daerah, alokasi untuk Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp 10T

Pagu  
Anggaran  
Program PEN

Rp695,2  
Triliun

### Dukungan Untuk Pemda

Rp27 Triliun

Rp5 T

DID Tambahan  
Pemulihan  
ekonomi

Rp8,7 T

Cadangan  
DAK Fisik

Rp3,3 T

Hibah  
Pariwisata

Rp10 T

Pinjaman  
PEN  
Daerah



## Pengaturan Pinjaman PEN Daerah

- Dasar hukum Pinjaman PEN daerah adalah PP 43/2020 (Perubahan PP 23/2020) yang pelaksanaannya diatur dalam PMK 105/2020 direvisi dengan PMK 179/2020

### PP 43/2020 pasal 15(2) & pasal 158

- Salah satu Investasi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program PEN adalah investasi langsung dalam bentuk Pinjaman PEN Daerah
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjaman PEN Daerah diatur dengan PMK

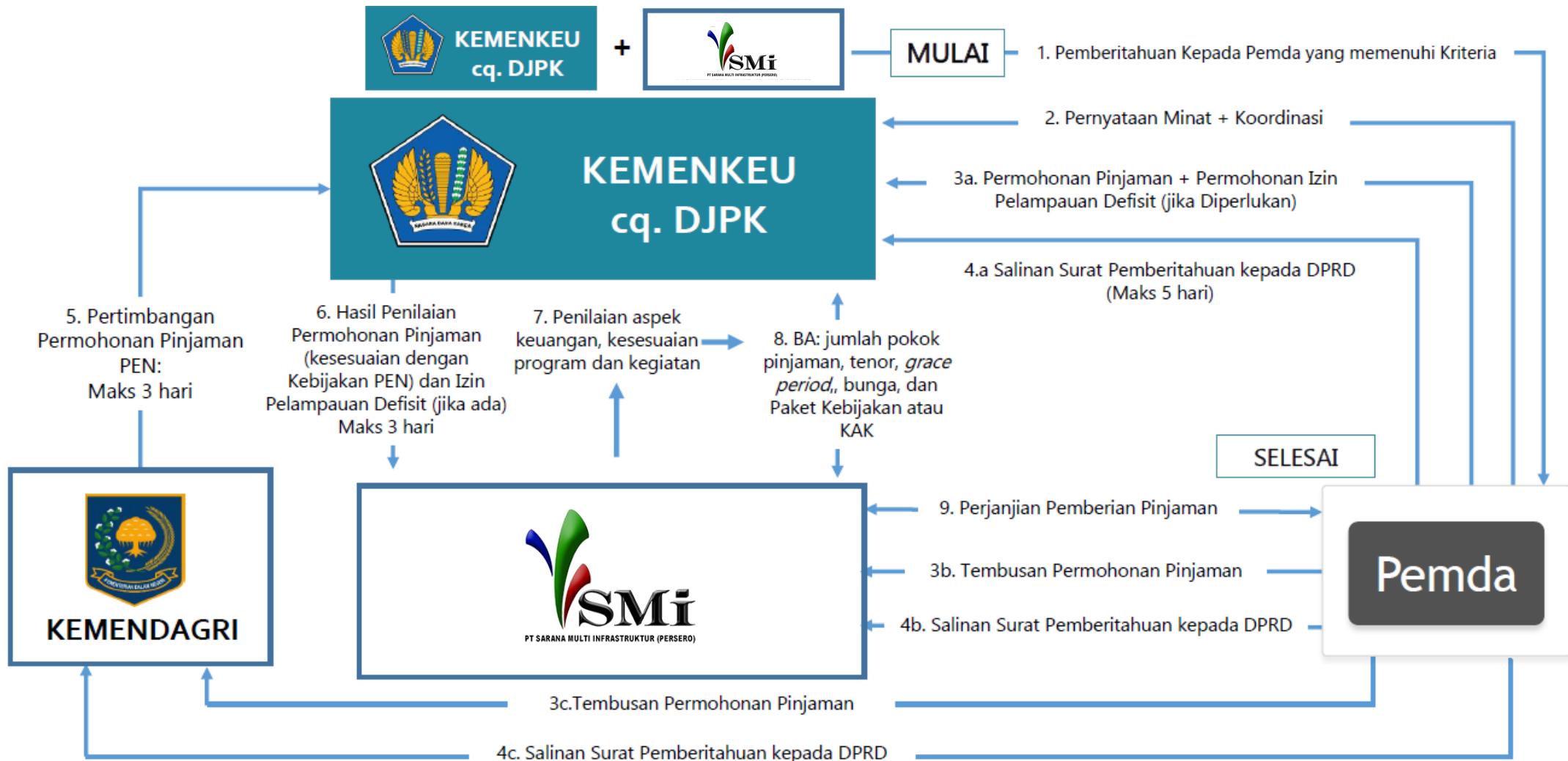
### Pokok-pokok Pengaturan dalam PMK 105/2020

- Ruang lingkup pinjaman (sumber dana, bentuk, jangka waktu dan persyaratan)
- Perencanaan & Penganggaran
- Perjanjian Pengelolaan Pinjaman
- Pengusulan dan Penilaian
- Perjanjian Pinjaman
- Pembayaran Pinjaman
- Subsidi Bunga Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN
- Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan

# Mengapa Perlu PEN Daerah



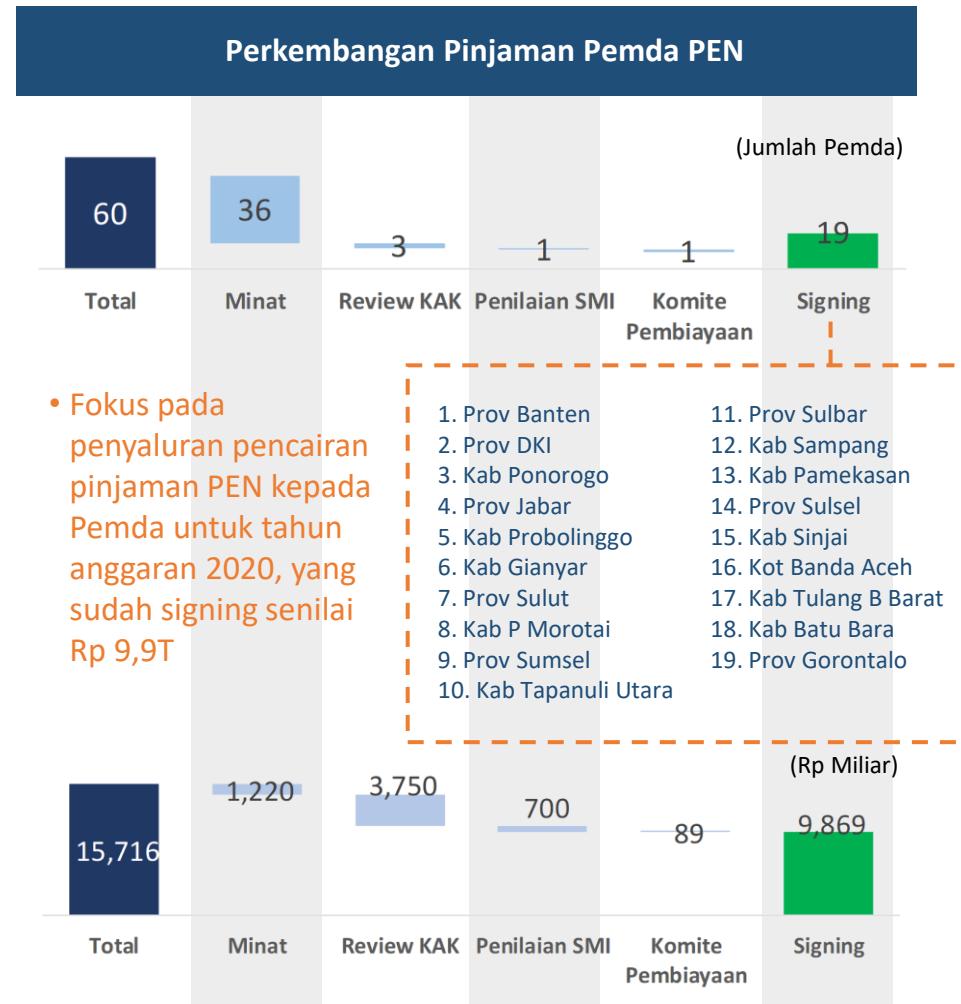
# Skema Pengajuan Pinjaman PEN Daerah



# Progress Pinjaman Daerah PEN

Update per posisi November 2020:

- Total sebanyak **60 Pemda** menyatakan **berminat** mengajukan proposal Pinjaman PEN Daerah, dengan total nilai Rp 15,7T.
- **19 Pemda** sudah **menandatangani perjanjian** pinjaman PEN dengan PT SMI, dengan total nilai Rp 9,9T.
- Dalam sisa waktu tahun anggaran 2020 ini, PT SMI fokus untuk pelaksanaan pencairan pinjaman kepada Pemda yang sudah menandatangani perjanjian pinjaman



IP PEN - BUMN



# Pertimbangan Investasi Pemerintah PEN

Investasi Pemerintah PEN dilaksanakan dengan mempertimbangkan antara lain:



**Pengaruh atau dampak terhadap hajat hidup masyarakat**



**Eksposur terhadap sistem keuangan**



**Peran calon Penerima Investasi**



**Kepemilikan pemerintah, dalam hal BUMN sebagai calon Penerima Investasi**



**Total aset yang dimiliki calon Penerima Investasi**



# Kriteria Pelaksana Investasi & Aspek Penilaian Investasi



## Kriteria Pelaksana Investasi

1. Kapasitas keuangan dan kompetensi BUMN atau LPEI;
2. Tingkat pemahaman atas karakteristik bisnis calon Penerima Investasi;
3. Bidang usaha BUMN atau LPEI; dan
4. Tidak memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN.



## Aspek yang dinilai dari usulan dukungan calon penerima investasi

- 1 Aspek Urgensi
- 2 Aspek Ekonomi
- 3 Aspek Keuangan
- 4 Aspek Risiko
- 5 Aspek Pengembalian
- 6 Aspek Hukum
- 7 Aspek Fiskal



## Dukungan dan Kompetensi



Dukungan Kemenkeu



Kompetensi Internal SMI sebagai SMV



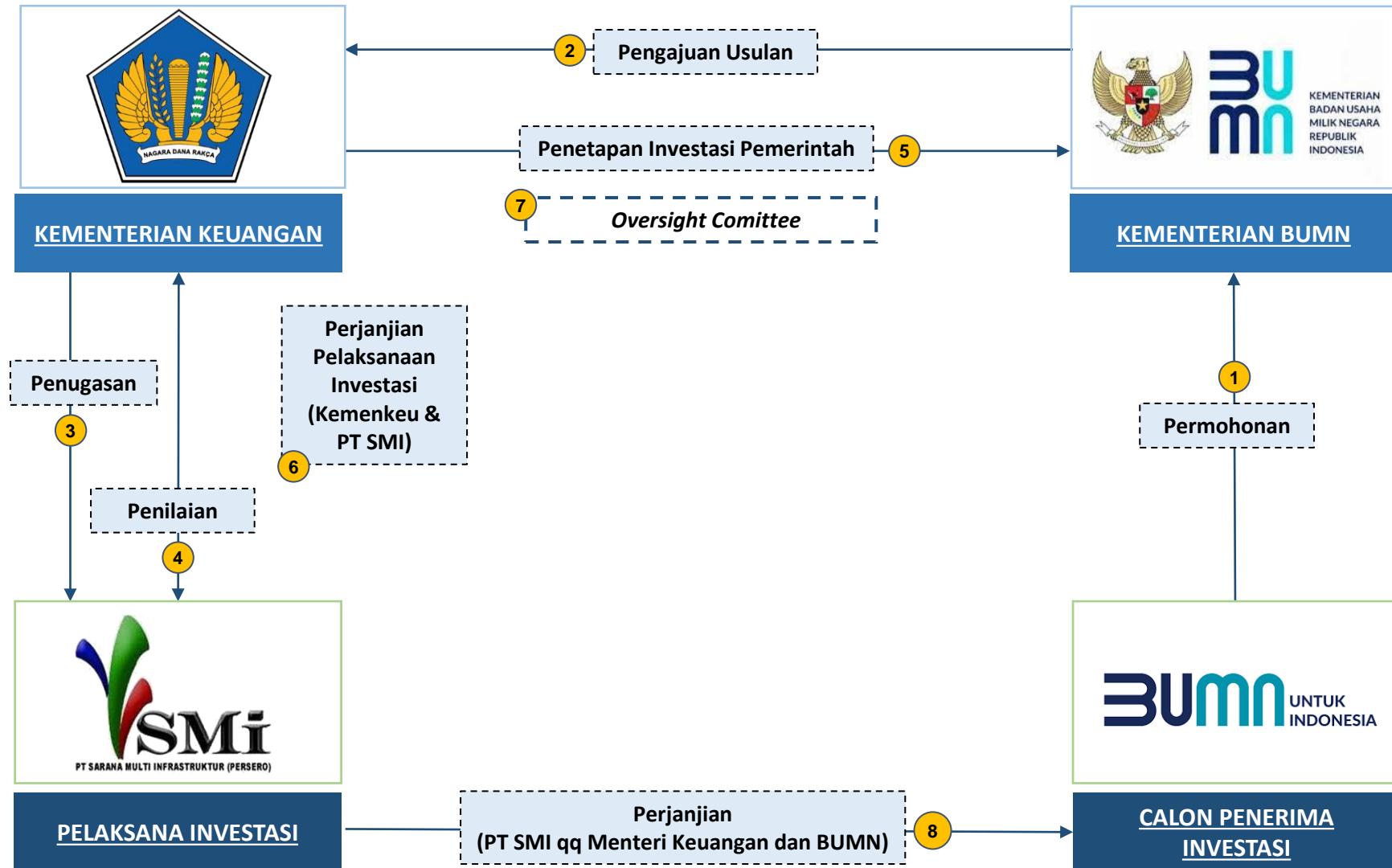
Tenaga Profesional Penunjang/Konsultan Bidang Keuangan & Bidang Hukum



Dukungan Lembaga Penelitian/Akademisi

Kompetensi eksternal yang diadakan melalui mekanisme pengadaan sesuai ketentuan dan peraturan perundungan yang berlaku

# PT SMI Sebagai Pelaksana Investasi Pemerintah PEN-BUMN

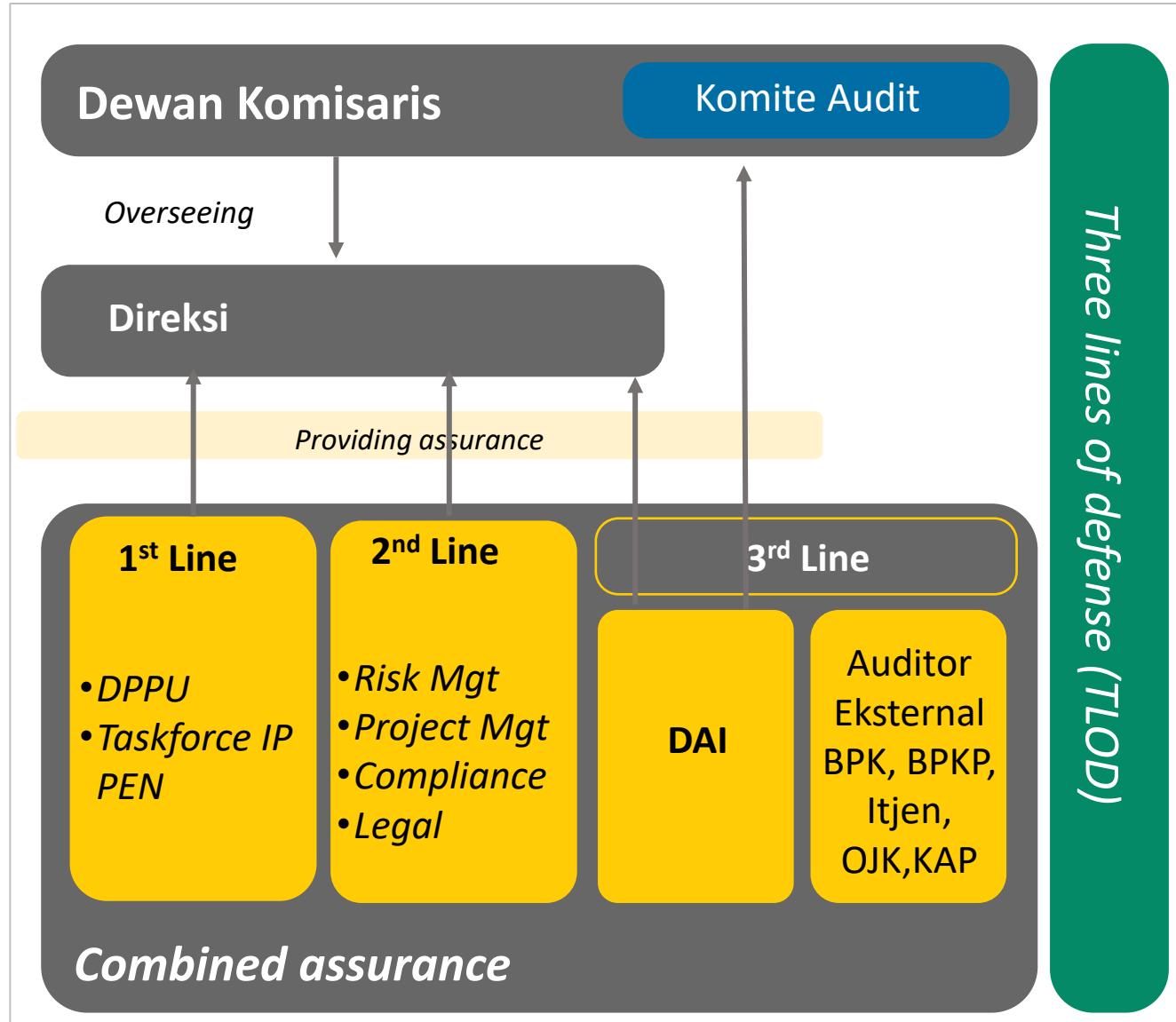




## Assurance Framework – Level Entitas PT SMI



# Assurance Framework - Level Entitas PT SMI



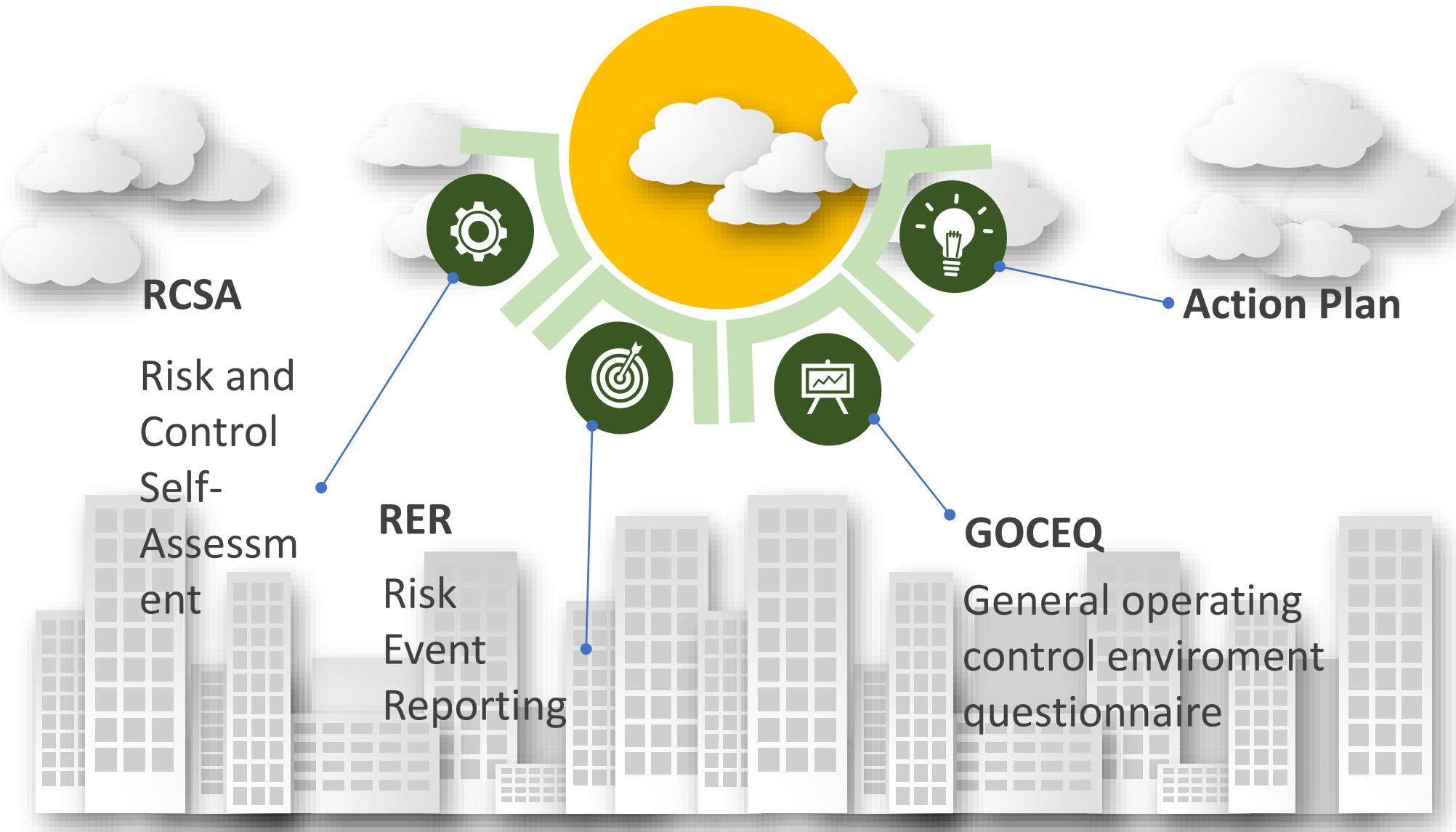
**Combined assurance**  
 PT SMI menggunakan model combined assurance untuk memastikan mandat yang diterima dapat dijalankan dengan baik. Dalam model ini, ketiga lini menjalankan assurance, saling berkomunikasi dan berkolaborasi, sehingga dapat saling cek dan recheck meminimalkan gaps dan overlaps.

# Assurance oleh 1<sup>st</sup> Line

No progress      Completed  
 Not started      Delayed      Special attention      On track

Progress Report	KAI	Garuda Indonesia	KRAKATAU STEEL	PIC
<b>Preparation Stage (lanjutan):</b>				
Penunjukan Konsultan	(8 Sep 2020)	(8 Sep 2020)	(8 Sep 2020)	PT SMI
Evaluasi Usulan PEN	(27 Nov 2020)	(27 Nov 2020)	(27 Nov 2020)	PT SMI dan Konsultan
Perianjian Pelaksana Investasi (Kemenkeu dan SMI)	(27 Nov 2020)	(27 Nov 2020)	(27 Nov 2020)	Kemenkeu dan PT SMI
Rencana Pemantauan oleh Dirjen	(27 Nov 2020)	(27 Nov 2020)	(27 Nov 2020)	Kemenkeu
Persetujuan IP PEN oleh Menkeu	(25 Nov 2020)	(25 Nov 2020)	(25 Nov 2020)	Kemenkeu
Tandatangan Perjanjian Pelaksana Investasi (Kemenkeu dan SMI)	(30 Nov 2020)	(30 Nov 2020)	(30 Nov 2020)	Kemenkeu dan PT SMI
<b>Transaction Stage:</b>				
Drafting Termsheet Dokumen Transaksi BUMN dan SMI	n/a	(14 Okt 2020)	(14 Okt 2020)	BUMN, PT SMI dan Konsultan
Penyampaian Agenda RUPS ke OJK				BUMN (Tbk.)

# Assurance oleh 2<sup>nd</sup> Line



# Assurance oleh 3<sup>rd</sup> Line



# Assurance Map

		Management 1 <sup>st</sup> Line															Functional Oversight 2 <sup>nd</sup> Line				Independent 3 <sup>rd</sup> Line		
Kategori Risiko	Aktivitas Utama	DPI	DUS	DPPU	DPB	DJK	DPP	DKHI	DPIK	DSP	DUP	DPMO	DTI	DAA	DSDM	DPPK	DRE	DEPI	DELU	DH	DMRT	DPKMI	DAI
		1 <sup>st</sup> Line															2 <sup>nd</sup> Line				3 <sup>rd</sup> Line		
Risiko kredit	Pemenuhan Dokumen Kewajiban																						
Risiko kredit	Penagihan kepada Debitur																						
Risiko kredit	Pencairan Pinjaman																						
Risiko kredit	Penempatan dana Investasi																						
Risiko kredit	Pengamanan agunan fixed asset Pembiayaan.																						
Risiko kredit	Pengamanan agunan non fixed asset Pembiayaan.																						
Risiko kredit	Pengelolaan tagihan																						
Risiko kredit	Membuat konsep perjanjian terkait pembiayaan dan investasi																						
Risiko kredit	Perolehan Penugasan Proyek (Mandatory)																						

Keterangan:

Total risk coverage

Partial risk coverage

Limited or no risk coverage

Risk area outside function's mandate

# Terima kasih,



## PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Sahid Sudirman Center, Lantai 48

Jl. Jenderal Sudirman No. 86

Jakarta 10220, Indonesia

Telepon : (62-21) 8082 5288 (hunting)

Faksimile : (62-21) 8082 5258

Surel : [corporatesecretary@ptsmi.co.id](mailto:corporatesecretary@ptsmi.co.id)

